

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN

Yuliawan Diceu Komarayudha¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

East Asia presents a highly complex security landscape shaped by great power rivalry, historical tensions, and overlapping strategic interests. Post-Cold War U.S. intervention has led to the formation of security alliances with Japan and South Korea, primarily in response to the North Korean threat and the growing military influence of China. Conversely, China views these alliances as containment efforts, prompting an arms race and exacerbating the regional security dilemma. Territorial disputes, the Taiwan issue, and tensions on the Korean Peninsula further destabilize the region. Within this context, the United States has designated East Asia as a strategic priority under its Indo-Pacific Strategy, guided by neorealist principles and national interest. The intricacy of inter-state relations hinders effective cooperation, thereby sustaining a high potential for conflict and regional instability.

Keywords: East Asia, regional security, United States foreign policy, security dilemma, military alliances, Indo-Pacific Strategy, neorealism.

ABSTRAK

Kawasan Asia Timur menghadirkan dinamika keamanan kompleks yang dipengaruhi oleh persaingan kekuatan besar, rivalitas historis, dan kepentingan strategis. Intervensi Amerika Serikat pasca-Perang Dingin membentuk aliansi keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara dan kebangkitan militer Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok memandang langkah ini sebagai upaya containment, mendorong perlombaan senjata dan memperkuat dilema keamanan di kawasan. Sengketa wilayah, isu Taiwan, serta ketegangan di Semenanjung Korea turut memperburuk stabilitas regional. Dalam konteks ini, Amerika Serikat menempatkan Asia Timur sebagai kawasan prioritas dalam strategi Indo-Pasifik melalui pendekatan neorealisme dan kepentingan nasional. Kompleksitas hubungan antarnegara membuat kerja sama sulit terwujud secara efektif, sehingga potensi konflik dan ketidak stabilan tetap tinggi.

Kata Kunci: Asia Timur, keamanan kawasan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dilema keamanan, aliansi militer, Strategi Indo-Pasifik, neorealisme

PENDAHULUAN

Keamanan kawasan menjadi arena dimana sebuah dinamika keamanan nasional dan keamanan global saling mempengaruhi satu sama lainnya karena keamanan negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara lain baik skala kawasan maupun global. Asia Timur merupakan kawasan dengan dinamika politik keamanan yang begitu kompleks hingga mempengaruhi pola hubungan keamanan dengan negara - negara lainnya. Adanya perbedaan paham antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca perang dingin membuat persetujuan berlanjut ke negara – negara wilayah Asia Timur seperti Korea Utara dengan Korea Selatan. Adanya campur tangan negara adidaya dalam konflik keamanan kawasan merubah persepsi ancaman dan pola keamanan setiap negara di kawasan.

Kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur dapat dipahami dengan menguraikan ikatan yang rumit antara hubungan keamanan Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Ketegangan dalam hubungan ini terlihat jelas melalui persepsi Cina dan Korea Selatan yang curiga terhadap upaya Jepang untuk merevisi sejarah okupasinya di Semenanjung Korea serta sebagian wilayah Cina pada awal abad ke-20 (History, 2020). Hubungan antara Cina dan Korea Selatan pun tidak sepenuhnya harmonis. Cina menyampaikan ketidakpuasannya terhadap rencana Korea Selatan untuk memasang sistem pertahanan rudal canggih yang ditujukan untuk merespons ancaman nuklir Korea Utara. Rencana ini dianggap oleh Cina sebagai cerminan dari keinginan Amerika Serikat untuk mengawasi Cina. Perkara sengketa wilayah juga semakin memperumit dinamika keamanan antarnegara tersebut. Misalnya, Cina dan Jepang masih terlibat sengketa mengenai pulau Diaoyu (atau Senkaku) di Laut Cina Selatan (Roza Rizky, 2012). Di sisi lain, Cina dan Korea Selatan juga terlibat dalam perselisihan wilayah dengan Jepang terkait sejumlah pulau di Laut Cina Timur serta perairan yang memisahkan Jepang dan Korea Selatan.

Perkembangan ekonomi yang dialami Cina menjadi ancaman bagi negara – negara aliansi sekutu diantaranya Korea Selatan dan Jepang. Peningkatan taraf ekonomi akan diiringi dengan perkembangan kekuatan militer dan pertahanan. Peningkatan kapabilitas kekuatan militer dilakukan dengan adanya modernisasi alutsista maupun penambahan kuantitas kekuatan yang dimiliki sehingga dapat membuat negara lain di kawasan menjadi khawatir. Kekhawatiran terbesar akan dirasakan oleh Amerika Serikat dan aliansinya di Asia Timur meliputi Korea Selatan dan Jepang. Untuk membendung kekuatan Cina, AS telah memfokuskan kebijakan pada kerjasama aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan selama masa pemerintahan Donald Trump menjadikan kepentingan keamanan Asia Timur sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri AS akan selalu difokuskan kepada wilayah dengan nilai strategis yang dapat mempengaruhi pengaruh kawasan hingga global. Dalam hal ini, prioritas utama adalah membendung kekuatan dan hegemoni Cina dalam pengaruh internasional khususnya kawasan.

Dalam konteks keamanan di Asia Timur, terdapat keunikan dalam hubungan yang dijalin oleh Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, Cina tidak selalu dilihat sebagai ancaman yang meresahkan bagi keamanan nasionalnya. Justru, ancaman yang lebih nyata bagi Korea Selatan berasal dari Korea Utara. Oleh karena itu, Korea Selatan senantiasa berusaha untuk menahan laju kekuatan Korea Utara melalui aliansi strategis dengan Amerika Serikat. Dalam pergaulan aliansi ini, Korea Selatan tidak selalu merespons secara aktif setiap kebijakan terkait Cina, karena fokus utama ancaman keamanannya adalah Korea Utara. Di sisi lain, secara historis,

baik Korea Selatan maupun Cina memiliki sentimen yang kuat terhadap Jepang. Namun, bagi Jepang, Cina menjadi masalah utama dalam hal keamanan di kawasan. Jepang berusaha merespons dengan aktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Cina. Dengan semakin kokohnya peran Cina yang berpotensi untuk mendominasi Asia Timur, Jepang merasa kredibilitasnya di kawasan ini terancam (Eka, 2007). Ancaman tersebut memiliki dampak langsung pada Jepang, mengingat posisinya yang secara geografis dekat dengan Cina. Oleh karena itu, Jepang merasa perlu untuk memperkuat diri dan menekan perkembangan militer Cina. Peningkatan kekuatan militer serta sistem persenjataan Cina menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Jepang, yang berpengaruh tidak hanya di kawasan tetapi juga dalam skala global.

Aliansi yang terbentuk di kawasan Asia Timur menjadi ancaman bagi negara – negara lain di Kawasan. Meskipun pada suatu waktu hubungan antar negara aliansi tidak selalu harmonis meskipun diantaranya merupakan sekutu kerjasama keamanan. Kerumitan hubungan tersebut yang menambah kompleksnya stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Selain itu permasalahan semenanjung Korea dan semenanjung Taiwan menjadi isu penting dalam kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur (M Simela, 2022). konflik Cina dan Taiwan menjadikan babak baru persaingan tidak hanya dalam bidang militer namun perkembangan teknologi. Taiwan yang dikenal sebagai negara penghasil semi-konduktor terbesar di dunia terancam dengan kehadiran Cina yang menawarkan reunifikasi terhadap negara Taiwan berdasarkan dengan nilai historis. Sehingga dalam hal tersebut, Amerika Serikat akhirnya turun tangan dan mendukung Taiwan apabila terjadi konflik dengan Cina. Hal ini menambah daftar panjang persaingan dua negara adidaya antara Cina dan AS dalam hal ekonomi dan keamanan terutama menyangkut masalah Taiwan.

Hubungan keamanan antarnegara di kawasan Asia Timur membawa risiko tersendiri, terutama dengan kehadiran Amerika Serikat dalam interaksi keamanannya. Potensi kompetisi antara negara menjadi semakin jelas ketika Amerika Serikat, Jepang, dan Cina saling berusaha untuk memperkuat pengaruh di wilayah ini, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Hal ini dapat memicu konflik dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan, sehingga menghambat upaya kerjasama antarnegara. Cina memainkan peranan yang signifikan seiring dengan peningkatan kapabilitas nasionalnya, yang dilihat sebagai tantangan tidak hanya bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, tetapi juga bagi negara-negara yang beraliansi dengan Amerika di Asia Timur. Selain itu, isu Semenanjung Korea menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi kompleksitas keamanan di kawasan ini. Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya konflik sejarah antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Perang Korea dan invasi Jepang ke Cina adalah contoh nyata bahwa faktor historis berperan penting dalam menumbuhkan rasa curiga dan kewaspadaan terhadap keamanan di wilayah ini. Akibatnya, muncul skeptisisme terhadap kemungkinan terjalannya kerja sama yang efektif untuk mencapai stabilitas keamanan kawasan.

Kawasan Asia Timur juga telah diakui secara resmi oleh Amerika Serikat sebagai salah satu wilayah strategis di dunia. Strategi rebalancing yang mengedepankan fokus pada kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Timur, mengubah paradigma keamanan kontemporer Amerika Serikat. Penarikan pasukan dari Timur Tengah memperkuat indikasi adanya perubahan dalam kebijakan militer Amerika ke arah Asia Pasifik dan Asia Timur (Defense priorities, 2020). Sebanyak 60% pasukan yang sebelumnya ditempatkan di Timur Tengah kini berada di bawah komando *The United States Pacific Command* (USPACOM), yang menunjukkan betapa pentingnya kawasan Asia Timur dalam pandangan Amerika Serikat sebagai area strategis.

KERANGKA ANALITIK

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran merupakan buah hasil analisis Kerangka pemikiran digunakan untuk mendapatkan hasil analisis yang sempurna dan berdasar. Sebelum masuk pada pembahasan utama, peneliti perlu untuk menguraikan terlebih dahulu teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di kaji. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan neorealisme sebagai pendekatan utama. Teori neorealisme, yang pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori realisme sebelumnya yang beranggapan bahwa sifat dasar manusia merupakan penjelasan utama bagi berbagai fenomena perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2016). Teori ini menekankan pentingnya struktur sistem internasional yang bersifat anarkis dan distribusi kekuasaan dalam menjelaskan perilaku negara. Terdapat empat asumsi dasar dalam neorealisme: (1) sistem internasional bersifat anarkis dan memaksa negara untuk bertindak secara mandiri dalam menjamin kelangsungan hidupnya melalui prinsip *self-help*; (2) struktur internasional menciptakan ketidakpastian terhadap niat negara lain, sehingga mendorong negara untuk memperkuat kapabilitas militernya; (3) kepentingan nasional menjadi orientasi utama dalam setiap interaksi internasional; dan (4) negara merupakan aktor rasional yang senantiasa berupaya memaksimalkan keuntungannya dan meminimalkan kerugiannya dalam kompetisi global. Dalam konteks ini, neorealisme memberikan pijakan teoritis yang kuat untuk memahami pola tindakan dan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika kekuatan dan ancaman di kawasan Asia Timur, khususnya pada masa pemerintahan Joe Biden, yang berupaya menyeimbangkan pengaruh Cina melalui penguatan aliansi strategis dan penyesuaian postur militer.

Selain menggunakan pendekatan neorealisme, penelitian ini juga memanfaatkan teori kebijakan luar negeri sebagai kerangka analitik pelengkap dalam menjelaskan dinamika interaksi internasional yang melibatkan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Teori kebijakan luar negeri digunakan sebagai kerangka pelengkap untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat merespons dinamika keamanan di Asia Timur. Dalam teori ini, kebijakan luar negeri dipahami sebagai alat negara untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dicapai hanya melalui sumber daya domestic (Amstutz R mark, 1995). Mengacu pada pandangan William D. Coplin, negara berperan sebagai aktor dalam mencapai tujuan nasional, dan kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh sebuah negara merupakan respons terhadap tindakan yang diambil oleh negara lain (William D. Copin, 1971)

Selain itu, peneliti juga menggunakan Konsep kepentingan nasional yang menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar dalam politik luar negeri, sedangkan Plano dan Olton menyebutnya sebagai panduan utama bagi para pembuat kebijakan. Kepentingan ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan vital—seperti keamanan, ekonomi, dan perlindungan wilayah—serta keinginan yang bersifat non-keamanan, seperti promosi demokrasi (Jack C. Plano, 1982). Nuechterlein kemudian mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi empat: pertahanan, ekonomi, tata dunia, dan ideologi (Donald E. Nuechterlein, 1976). Dalam konteks ini, analisis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Timur harus dilihat sebagai upaya memenuhi kepentingan nasional dalam keempat aspek tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan meneliti objek alamiah dimana instrumen kunci penelitian terletak pada peneliti sendiri. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, Nasir menjelaskan desain penelitian tersebut digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran ataupun lukisan fenomena secara faktuan dan akurat berdasar pada fakta – fakta, sifat dan hubungan yang terjadi dalam fenomena tersebut dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Kawasan Asia Timur memiliki signifikansi strategis tinggi sebagai titik pertemuan kepentingan kekuatan global, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara, yang saling bersaing dalam memperluas pengaruh politik dan ekonomi. Dinamika ini semakin kompleks dengan keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam struktur keamanan regional, khususnya melalui aliansi trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan. Interaksi keamanan di antara ketiga negara tersebut menjadi determinan utama dalam membentuk stabilitas kawasan. Namun, absennya mekanisme kerja sama dan institusi keamanan regional yang efektif menjadikan Asia Timur rentan terhadap eskalasi konflik. Ketegangan di wilayah ini umumnya dipicu oleh isu-isu geopolitik yang belum terselesaikan, seperti status Taiwan, program nuklir Korea Utara, serta persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Korea Utara secara konsisten melanjutkan program nuklirnya sebagai reaksi terhadap keberadaan militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea, yang disertai dengan uji coba rudal balistik secara berkala (Pongtiku J, 2024). Hal ini meningkatkan kekhawatiran keamanan di kalangan negara-negara tetangga, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Dalam konteks ini, aliansi antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menjadi pilar utama dalam menjaga kestabilan kawasan melalui kebijakan extended deterrence dan pembentukan Nuclear Consultative Group yang memperkuat koordinasi strategis.

Selain pendekatan berbasis kekuatan militer, kerja sama multilateral juga memainkan peran penting. Kemitraan ASEAN–Jepang, misalnya, berkontribusi dalam memperkuat norma-norma internasional seperti supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi dasar penting bagi perdamaian jangka panjang (Kamala D, 2024). Oleh karena itu, stabilitas Asia Timur tidak hanya ditentukan oleh aspek militer, tetapi juga oleh diplomasi regional, kerja sama kolektif, dan respons terhadap tantangan keamanan non-tradisional, termasuk keamanan siber dan perubahan iklim.

Kemitraan ASEAN–Jepang memegang peran strategis dalam menopang stabilitas kawasan yang diwarnai oleh dinamika rivalitas geopolitik dan ketegangan militer. Sebagai kekuatan utama dalam bidang ekonomi dan teknologi di kawasan, Jepang memanfaatkan hubungannya dengan ASEAN untuk memperkuat rules-based order dan mendorong pendekatan diplomasi normatif, khususnya dalam menghadapi ekspansi pengaruh Tiongkok dan ketegangan di Semenanjung Korea. Kemitraan ini telah berkembang menjadi fondasi penting bagi stabilitas regional di Asia Timur dan kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerja sama ini, ASEAN dan Jepang secara konsisten memajukan nilai-nilai demokrasi, supremasi

hukum, serta penghormatan terhadap hukum internasional sebagai pilar utama bagi perdamaian jangka panjang. Praktik habit of dialogue yang terbentuk dari kolaborasi ini juga berkontribusi dalam mengurangi potensi eskalasi konflik di wilayah sensitif seperti Laut Tiongkok Timur dan Semenanjung Korea (Gatra S, 2023).

Lebih lanjut, Jepang berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan ASEAN dalam menghadapi tantangan lintas batas, termasuk keamanan maritim, keamanan siber, dan perubahan iklim. Pendekatan ini menegaskan peran operasional kemitraan ASEAN–Jepang dalam membangun arsitektur keamanan kawasan yang bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan—terutama di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya persaingan antara kekuatan besar. Di samping itu, Amerika Serikat juga merupakan aktor kunci dalam menjaga stabilitas Asia Timur melalui aliansi strategisnya bersama Jepang dan Korea Selatan. Dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, seperti program nuklir Korea Utara dan ekspansi geopolitik Tiongkok, Amerika Serikat menjalankan fungsi *strategic balancer* melalui kebijakan *extended deterrence*, yang memperkuat jaminan keamanan terhadap sekutunya sekaligus mendukung ketahanan regional.

Kebijakan pertahanan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur mencerminkan komitmen kuat untuk melindungi sekutunya melalui strategi *extended deterrence*, yang mencakup payung nuklir dan kehadiran militer langsung. Salah satu manifestasi konkret dari strategi ini adalah pembentukan *Nuclear Consultative Group* (NCG) antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang bertujuan memperkuat koordinasi strategis dalam merespons ancaman nuklir dari Korea Utara. Jepang pun turut berperan dalam kerja sama trilateral ini, mengingat jangkauan rudal Korea Utara yang mencakup wilayahnya. Di luar dimensi militer, Amerika Serikat juga aktif mengedepankan diplomasi multilateral melalui keterlibatan dalam forum-forum seperti *East Asia Summit* dan *ASEAN Regional Forum*. Upaya ini ditujukan untuk mempertahankan *rules-based order* serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai, termasuk di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan.

Namun, kehadiran militer AS di kawasan turut menghadirkan kompleksitas baru. Sejumlah analis mengemukakan bahwa strategi *extended deterrence* justru dapat menghambat terwujudnya arsitektur keamanan kolektif yang inklusif, karena kecenderungannya memperkuat hubungan berbasis permusuhan antarnegara. Meskipun demikian, dalam menghadapi ancaman nyata seperti program nuklir Korea Utara, pendekatan ini masih dianggap sebagai opsi paling pragmatis dalam menjaga stabilitas regional.

A. Isu kawasan Asia Timur

Kawasan Asia Timur merepresentasikan sebuah lanskap geopolitik yang kompleks, di mana kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan dari berbagai kekuatan besar saling berinterseksi. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi episentrum dari eskalasi ketegangan regional, khususnya dalam isu-isu strategis seperti status Taiwan, konflik di Laut Tiongkok Timur, serta dominasi dalam penguasaan teknologi mutakhir. Kompleksitas ini semakin meningkat akibat keberlanjutan program nuklir Korea Utara yang menimbulkan kekhawatiran serius bagi Jepang dan Korea Selatan, sekaligus mendorong

penguatan aliansi militer mereka dengan Amerika Serikat. Di samping itu, perselisihan teritorial, seperti klaim atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok, turut memperkeruh konfigurasi keamanan kawasan, menjadikannya salah satu wilayah dengan potensi konflik yang tinggi dalam tatanan internasional kontemporer.

Laut Cina Selatan menjadi salah satu titik konflik geopolitik paling rumit dan sensitif di kawasan Asia-Pasifik, mengingat keterkaitan antara kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan dari berbagai aktor negara. Sengketa ini dipicu oleh klaim teritorial yang tumpang tindih atas wilayah maritim yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta signifikansi militer, dengan negara-negara seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan menjadi pihak-pihak yang bersengketa (Tamviz A, 2024). Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan melalui peta *nine-dash line*, meskipun klaim ini telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016. Ketegangan meningkat seiring dengan upaya Tiongkok mereklamasi wilayah dan membangun instalasi militer di kawasan sengketa seperti Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Tindakan ini dipandang oleh negara-negara pengklaim lain sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka dan ancaman terhadap prinsip kebebasan navigasi. Mengingat Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran vital bagi lebih dari 64% perdagangan barang dunia, konflik ini memiliki implikasi tidak hanya regional, tetapi juga global terhadap stabilitas dan tata kelola maritim internasional (Aldrin M, 2025).

Konflik di Laut Cina Selatan memiliki implikasi strategis yang melampaui batas Asia Tenggara, dengan dampak langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Timur secara keseluruhan. Wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling krusial di dunia, menghubungkan Asia Timur dengan kawasan seperti Timur Tengah dan Eropa, serta dilintasi oleh sekitar sepertiga volume perdagangan maritim global (Sakina A, 2024). Eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan berpotensi mengganggu rantai pasok global, terutama bagi negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang sangat bergantung pada jalur perdagangan tersebut. Tiongkok, melalui klaim sepihak berdasarkan peta *nine-dash line* dan pembangunan instalasi militer di wilayah sengketa seperti Spratly dan Scarborough, memicu kekhawatiran negara-negara kawasan terhadap stabilitas regional. Jepang memandang langkah Tiongkok sebagai bentuk ekspansi strategis yang mengancam keseimbangan kekuatan.

Sementara itu, meskipun bukan pihak pengklaim, Amerika Serikat memainkan peran aktif melalui operasi *Freedom of Navigation* (FONOPs) untuk menjaga kebebasan navigasi dan mempertahankan status quo yang sejalan dengan kepentingan hegemoniknya di Indo-Pasifik. Kehadiran militer AS dan kerja samanya dengan negara-negara sekutu turut memperkuat dimensi pertahanan kawasan, namun sekaligus memperdalam rivalitas strategis dengan Tiongkok. Operasi *Freedom of Navigation* (FONOPs) yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk mengoreksi klaim maritim yang dinilai eksekusif dan bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 (Bahri M, 2016).

Amerika Serikat secara konsisten melaksanakan operasi *Freedom of Navigation* (FONOPs) di perairan yang diklaim oleh Tiongkok, seperti di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel, guna menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan laut lepas yang terbuka bagi pelayaran internasional. Insiden seperti intersepsi kapal perusak USS *Decatur* oleh kapal perang Tiongkok mencerminkan eskalasi tensi militer di wilayah tersebut. Kehadiran militer AS tidak sekadar simbolik, melainkan bagian dari strategi untuk menopang stabilitas

kawasan dan menegakkan *rules-based order*, yang didukung oleh sekutu seperti Jepang dan Filipina. Namun, dari perspektif Tiongkok, FONOPs dipandang sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran kedaulatan. Ketegangan ini mencerminkan benturan struktural antara prinsip kebebasan navigasi yang dianut AS dan klaim maritim Tiongkok, yang berpotensi meningkatkan rivalitas strategis dan memerlukan penanganan diplomatik yang hati-hati untuk mencegah konflik terbuka.

Selain itu konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan manifestasi ketegangan ideologis yang berakar dari pembelahan geopolitik pasca-Perang Dunia II. Pembagian Semenanjung Korea pada garis paralel ke-38 sebagai batas administratif sementara antara zona pendudukan Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan menciptakan dua negara dengan sistem politik yang saling bertentangan—komunisme di Korea Utara dan demokrasi kapitalis di Korea Selatan. Polarisasi ideologis ini tidak hanya memicu perang terbuka pada awal 1950-an, tetapi juga terus memelihara ketegangan di era kontemporer, menjadikan Semenanjung Korea sebagai salah satu titik konflik paling sensitif dan berkelanjutan dalam dinamika keamanan Asia Timur (Wijayanti & Ningsih, 2022).

Ketegangan di Semenanjung Korea mencapai puncaknya dengan pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, yang melibatkan intervensi eksternal dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, absennya perjanjian damai membuat kedua Korea secara teknis masih berada dalam kondisi perang hingga kini. Situasi ini diperparah oleh program nuklir Korea Utara yang terus berkembang, termasuk uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang menimbulkan kekhawatiran di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Sebagai respons, Korea Selatan memperkuat aliansi militernya dengan Amerika Serikat melalui pembentukan *Nuclear Consultative Group* dan latihan militer bersama, yang turut melibatkan Jepang dalam kerangka kerja sama trilateral. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas, langkah ini juga memperdalam ketegangan dan memperkuat narasi konfrontatif yang telah lama membayangi kawasan.

Wacana mengenai penarikan sebagian pasukan Amerika Serikat dari wilayah Korea Selatan turut memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan komitmen strategis Washington terhadap pertahanan kawasan (Lestari N, 2025). Jika pengurangan kehadiran militer ini terealisasi, terdapat kemungkinan bahwa Korea Selatan dan Jepang akan terdorong untuk meningkatkan kapabilitas militer nasionalnya secara otonom, yang berpotensi menciptakan dinamika perlombaan senjata di kawasan dan memperumit upaya stabilisasi keamanan regional. Kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang Amerika Serikat di Asia Timur semakin mencuat seiring munculnya laporan mengenai rencana relokasi sekitar 4.500 personel militer dari Korea Selatan ke wilayah Indo-Pasifik lainnya, seperti Guam. Kendati Pentagon secara resmi membantah rencana tersebut, diskursus internal di tingkat elit militer AS menunjukkan adanya evaluasi ulang terhadap konfigurasi postur keamanannya di kawasan. Dinamika ini oleh sejumlah pengamat diinterpretasikan sebagai indikasi melemahnya determinasi strategis Washington dalam mempertahankan arsitektur pertahanan kolektif di Asia Timur (Planasari S, 2025).

Apabila pengurangan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Timur benar-benar terealisasi, terdapat potensi peningkatan otonomi strategis dari negara-negara sekutunya, khususnya Korea Selatan dan Jepang, dalam memperkuat kapabilitas pertahanan nasional masing-masing. Korea Selatan telah merespons dengan memperkuat sistem pertahanan rudal dan memperluas kerja sama teknologi militer, sementara Jepang mengambil langkah signifikan dengan merevisi kebijakan keamanannya, termasuk mengembangkan kemampuan

serangan balik (*counterstrike capabilities*) yang sebelumnya bertentangan dengan konstitusi pasifis pasca-Perang Dunia II (CNN, 2025). Dinamika ini dapat menjadi pemicu perlombaan senjata baru di kawasan, terutama jika Korea Utara meningkatkan program rudalnya sebagai bentuk respons. Ketidakseimbangan kekuatan serta asimetri persepsi ancaman di antara negara-negara Asia Timur memperbesar risiko eskalasi yang tidak disengaja, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas regional dan menimbulkan konsekuensi strategis berskala global.

B. Modernisasi Kekuatan Militer di Kawasan Asia Timur

Modernisasi militer di kawasan Asia Timur merepresentasikan respons strategis adaptif dari negara-negara utama, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara, terhadap meningkatnya kompleksitas dinamika keamanan regional. Kawasan ini berada dalam kondisi *negative peace*—yaitu ketiadaan konflik bersenjata terbuka, namun disertai potensi eskalasi akibat rivalitas kekuatan besar dan ketegangan historis yang belum terselesaikan.

Tiongkok muncul sebagai aktor paling dominan dalam proses transformasi ini. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, negara tersebut menargetkan pembentukan kekuatan militer "kelas dunia" pada tahun 2049. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan signifikan anggaran pertahanan, pengembangan teknologi militer canggih seperti rudal hipersonik, kapal induk, dan sistem anti-satelit, serta reformasi struktur komando militer. Langkah-langkah ini secara langsung mempengaruhi konfigurasi keamanan kawasan dan memperkuat pola bipolaritas dalam persaingan strategis, khususnya dalam konstestasi Jepang dan Amerika Serikat.

Modernisasi militer di Asia Timur merepresentasikan respons strategis negara-negara utama terhadap meningkatnya ketidakpastian regional dan global. Jepang, meskipun terikat oleh prinsip pasifisme dalam konstitusinya pasca-Perang Dunia II, telah melakukan reformasi kebijakan keamanan untuk memungkinkan pengembangan kemampuan serangan balik (*counterstrike capabilities*). Langkah ini diiringi dengan peningkatan anggaran pertahanan dan penguatan kerja sama trilateral bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara dan ekspansi militer Tiongkok.

Korea Selatan turut memprioritaskan penguatan sistem pertahanan rudal, pengembangan industri pertahanan domestik, serta peningkatan interoperabilitas dengan militer Amerika Serikat. Sementara itu, Korea Utara tetap konsisten melanjutkan program senjata nuklir dan rudal balistik sebagai bentuk deterrence terhadap tekanan eksternal, yang pada gilirannya mendorong percepatan modernisasi militer oleh negara-negara tetangganya. Konstelasi ini menandakan terjadinya dilema keamanan (*security dilemma*) yang semakin kompleks di kawasan.

Dalam konteks ini, modernisasi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kapabilitas militer semata, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat posisi geopolitik dan mempertahankan kedaulatan nasional. Namun, percepatan pembangunan militer yang tidak diimbangi dengan transparansi kebijakan dan mekanisme komunikasi strategis yang efektif berisiko memperbesar potensi eskalasi konflik. Ketimpangan kekuatan yang muncul dari modernisasi militer Tiongkok, khususnya, telah mendorong Jepang untuk melakukan penyesuaian signifikan dalam strategi keamanannya dan memperkuat kemitraan strategis regional guna merespons pergeseran struktur kekuatan kawasan.

Amerika Serikat memegang peran krusial sebagai penyeimbang strategis dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Melalui kebijakan *extended deterrence*, Washington memberikan jaminan keamanan kepada sekutu-sekutunya—khususnya Jepang dan Korea Selatan—dengan menghadirkan kehadiran militer langsung serta penyediaan payung nuklir sebagai elemen penangkal utama. Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan *Nuclear Consultative Group* (NCG), yang memungkinkan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait ancaman nuklir dari Korea Utara (Kompasiana, 2024). Selain melalui hubungan bilateral, Amerika Serikat turut menginisiasi kerja sama trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan guna memperkuat interoperabilitas militer serta membangun arsitektur pertahanan kolektif di Asia Timur. Inisiatif ini dirancang tidak hanya sebagai respons terhadap provokasi Korea Utara, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam menghadapi ekspansi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan Selatan. Dalam konteks ini, Amerika Serikat memainkan peran sebagai jangkar stabilitas kawasan dengan tujuan mencegah terjadinya dominasi hegemonik tunggal.

Namun demikian, kredibilitas komitmen jangka panjang Washington menghadapi tantangan, terutama terkait rencana penyesuaian postur militer seperti potensi pengurangan pasukan dari Semenanjung Korea yang memicu kekhawatiran di antara sekutu-sekutunya. Ketidakpastian ini berpotensi mendorong Jepang dan Korea Selatan untuk mengembangkan kapabilitas pertahanan secara mandiri, suatu dinamika yang dapat mempercepat siklus *security dilemma* dan meningkatkan risiko perlombaan senjata di kawasan.

Wacana penyesuaian postur militer Amerika Serikat di Asia Timur, khususnya terkait kemungkinan penarikan sebagian personel dari Korea Selatan, telah memicu pergeseran persepsi terhadap kredibilitas jaminan keamanan AS di mata sekutu regional. Jepang dan Korea Selatan, yang secara historis sangat bergantung pada kehadiran militer AS untuk menghadapi ancaman Korea Utara dan ekspansi militer Tiongkok, kini menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan otonomi strategis dalam bidang pertahanan. Langkah Jepang dalam merevisi doktrin keamanan guna memungkinkan pengembangan *counterstrike capabilities*, serta upaya Korea Selatan dalam memperkuat sistem pertahanan rudal dan industri militer domestik, mencerminkan strategi adaptif terhadap ketidakpastian geopolitik.

Diskursus mengenai relokasi sekitar 4.500 personel militer AS ke wilayah lain di Indo-Pasifik, seperti Guam, turut memperkuat urgensi bagi negara-negara sekutu untuk membangun kapabilitas pertahanan yang lebih mandiri. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, dinamika ini menunjukkan tantangan ganda bagi peran strategis Amerika Serikat sebagai jangkar stabilitas regional—yakni menjaga keseimbangan kekuatan sambil mempertahankan kepercayaan sekutu. Dalam konteks ini, kesinambungan stabilitas Asia Timur akan sangat bergantung pada kejelasan kebijakan strategis AS serta kemampuan negara-negara regional untuk merancang arsitektur keamanan yang lebih otonom namun tetap terkoordinasi dalam kerangka kolektif.

C. Kebijakan Strategis Amerika Serikat dalam Menjaga Stabilitas kawasan Asia Timur Pada Masa Pemerintahan Joe Biden

Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, kebijakan strategis Amerika Serikat terhadap Asia Timur menunjukkan penekanan kuat pada pendekatan multilateral, penguatan aliansi, serta komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan (*rules-based order*). Strategi ini secara eksplisit tercermin dalam dokumen *U.S. Indo-Pacific Strategy* yang dirilis

pada Februari 2022, yang menegaskan pentingnya mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sebagai landasan bagi stabilitas dan kemakmuran global. Sebagai bagian dari implementasinya, Amerika Serikat memprioritaskan revitalisasi aliansi tradisional dengan Jepang dan Korea Selatan melalui kerja sama trilateral yang mencakup peningkatan interoperabilitas militer, pelaksanaan latihan bersama, serta pembentukan *Nuclear Consultative Group* guna mengoordinasikan respons terhadap ancaman nuklir dari Korea Utara. Selain itu, Washington juga memperluas kemitraan strategis melalui forum-forum minilateral seperti QUAD (Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia), yang secara fungsional bertindak sebagai mekanisme penyeimbang terhadap ekspansi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam dimensi pertahanan, Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Asia Timur melalui pangkalan strategis di Okinawa, Guam, dan Semenanjung Korea. Kehadiran ini diperkuat dengan pelaksanaan misi *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) di Laut Tiongkok Selatan dan Timur, sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip kebebasan navigasi dan penolakan atas klaim maritim sepihak yang tidak sejalan dengan hukum laut internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, strategi Amerika Serikat terhadap kawasan tidak hanya berfokus pada superioritas militer, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan diplomatik dan penguatan ketahanan terhadap ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, pandemi, dan kejahatan siber. Pendekatan ini mencerminkan orientasi kebijakan yang holistik, menggabungkan elemen *hard power* dan *soft power* untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

Implementasi Strategi Indo-Pasifik yang dikodifikasi dalam dokumen kebijakan resmi pada Februari 2022 juga mendorong perubahan penting dalam kebijakan keamanan Jepang. Merespons dinamika ancaman regional, termasuk ekspansi militer Tiongkok dan peningkatan uji coba rudal Korea Utara, Jepang mengambil langkah strategis untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan memperluas peran Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) di luar batas tradisionalnya, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap lanskap keamanan yang semakin kompleks (Ipdefenseforum, 2024). Salah satu manifestasi paling menonjol dari perubahan tersebut adalah revisi terhadap *National Security Strategy* dan *National Defense Strategy* Jepang pada akhir tahun 2022. Untuk pertama kalinya, dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan Tiongkok sebagai “tantangan strategis terbesar.” Selain itu, Jepang mengadopsi kebijakan *counterstrike capabilities*, yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer secara preventif terhadap sumber ancaman langsung—sebuah langkah yang menandai pergeseran paradigmatik dari prinsip pasifisme yang menjadi pilar kebijakan pertahanan Jepang sejak pasca-Perang Dunia II.

Jepang telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat postur pertahanannya dengan menargetkan peningkatan anggaran militer hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027, sejalan dengan standar NATO. Anggaran tersebut dialokasikan untuk akuisisi sistem persenjataan berjangkauan jauh seperti rudal Tomahawk dari Amerika Serikat, penguatan kapabilitas pertahanan siber, serta peningkatan interoperabilitas melalui latihan gabungan dan integrasi sistem komando dengan militer AS. Dalam kerangka Indo-Pasifik, Jepang juga memainkan peran aktif dalam memperkuat arsitektur keamanan regional, terutama melalui kerja sama trilateral dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Selain itu, partisipasi Jepang dalam forum multilateral seperti QUAD dan *East Asia Summit* mencerminkan perluasan peran diplomatik

dan strategisnya di luar kawasan Asia Timur, sekaligus mempertegas kontribusinya dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Ipdefense, 2024).

Selain itu, Korea Selatan secara aktif memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas Asia Timur, termasuk melalui latihan militer gabungan, pembentukan *Nuclear Consultative Group* (2023), dan kerja sama trilateral dengan Jepang. Selain itu, Seoul mendorong modernisasi pertahanan mandiri, seperti pengembangan sistem rudal L-SAM dan investasi teknologi militer. Dalam kerangka Strategi Indo-Pasifik pemerintahan Biden, Korea Selatan memainkan peran strategis dalam menghadapi ancaman Korea Utara dan menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan (Ipdefense, 2024).

Pembentukan *Nuclear Consultative Group* (NCG) pada 2023 menjadi inisiatif konkret dalam memperkuat aliansi keamanan regional, memberikan Korea Selatan peran lebih besar dalam perencanaan pencegahan nuklir sebagai respons terhadap provokasi Korea Utara. Latihan gabungan seperti *Ulchi Freedom Shield* dan *Vigilant Storm* juga diperluas guna meningkatkan interoperabilitas militer AS–Korea Selatan. Amerika Serikat turut mendorong penguatan kerja sama trilateral dengan Jepang, meskipun relasi Seoul–Tokyo sempat tegang, dengan AS berperan sebagai mediator rekonsiliasi.

Langkah ini selaras dengan tiga tujuan strategis Washington: mencegah dominasi regional oleh satu kekuatan (khususnya Tiongkok), menjamin kebebasan navigasi, serta mempertahankan kredibilitas aliansi. Kolaborasi trilateral menjadi pilar utama dalam menghadapi ancaman Korea Utara dan penyeimbangan terhadap ekspansi Tiongkok, sekaligus mendukung kebijakan *extended deterrence*. Di luar aspek militer, AS menekankan pentingnya kawasan yang stabil dan berbasis aturan, mengingat Asia Timur merupakan pusat manufaktur dan jalur logistik global. Strategi Indo-Pasifik pemerintahan Biden menggabungkan kekuatan militer, diplomasi ekonomi, dan nilai-nilai normatif guna mempertahankan pengaruh AS dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kian kompleks.

Secara ekonomi, wilayah ini merupakan mitra dagang utama bagi Amerika Serikat, terutama melalui peran sentral negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dalam rantai pasok teknologi canggih, termasuk semikonduktor dan komponen elektronik. Ketegangan seperti yang terjadi di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan dikhawatirkan akan mengganggu arus perdagangan dan melemahkan daya saing industri AS. Merespons hal tersebut, Biden meluncurkan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) sebagai bentuk keterlibatan ekonomi yang fleksibel dan tidak bergantung pada mekanisme perjanjian perdagangan bebas konvensional (Poltak Partogi, 2013). Dari perspektif normatif, Amerika Serikat menegaskan komitmennya terhadap *rules-based international order* melalui penolakan terhadap klaim sepihak, promosi penyelesaian damai atas sengketa, serta penguatan supremasi hukum internasional. Sikap ini tercermin dalam dukungan terhadap penyusunan *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok, serta penolakan tegas terhadap klaim “nine-dash line” yang diajukan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan maritim AS, tetapi juga memperkuat posisi negara-negara Asia Timur yang mendukung prinsip keterbukaan, kedaulatan, dan stabilitas kawasan.

D. Dampak kebijakan Strategis Amereika Serikat Terhadap isu Laut China Selatan

Strategi Indo-Pasifik pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperkuat keterlibatan Amerika Serikat dalam dinamika Laut Cina Selatan sebagai bagian dari komitmennya

terhadap stabilitas kawasan dan penegakan *rules-based international order*. Dukungan Washington terhadap negara-negara pengklaim seperti Filipina dan Vietnam diwujudkan melalui kerja sama pertahanan, bantuan keamanan maritim, serta latihan militer gabungan. Peningkatan akses militer ke sejumlah pangkalan strategis di Filipina melalui *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) mencerminkan langkah konkret untuk mempercepat respons terhadap potensi krisis. Laut Cina Selatan kini menjadi episentrum rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bukan hanya karena kepentingan ekonomi dan sumber daya, tetapi juga sebagai simbol kontestasi pengaruh geopolitik. Melalui operasi *Freedom of Navigation* (FONOPs), AS secara tegas menolak klaim “nine-dash line” Tiongkok dan menegaskan pentingnya akses terbuka atas wilayah laut internasional bagi seluruh negara (Natanael K, 2025).

Meskipun dirancang untuk menjaga stabilitas, strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat turut meningkatkan potensi konfrontasi militer, seiring dengan respons Tiongkok yang memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan melalui pembangunan pulau buatan dan intensifikasi patroli. Kondisi ini menciptakan risiko insiden tak terduga dan menyoroti pentingnya mekanisme deeskalasi yang efektif. Sebagai bagian dari pendekatan seimbang antara deterrence dan diplomasi, pemerintahan Presiden Joe Biden mendorong penguatan tata kelola maritim melalui dukungan terhadap penyusunan *Code of Conduct* (CoC) ASEAN–Tiongkok dan penerapan *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES). Langkah ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam *U.S. Indo-Pacific Strategy* (2022), yang menegaskan komitmen terhadap tatanan berbasis aturan dan penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya Amerika Serikat untuk mengintegrasikan kekuatan militer dan diplomasi normatif dalam mengelola ketegangan di kawasan strategis Laut Cina Selatan.

E. Dampak Kebijakan Strategis Amerika Serikat Terhadap Konflik Korea Selatan Dan Korea Utara

Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat, meskipun bertujuan menjaga stabilitas kawasan, secara tidak langsung meningkatkan risiko konfrontasi militer akibat respons Tiongkok yang memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan. Kondisi ini menimbulkan potensi insiden tak terduga dan menekankan urgensi mekanisme deeskalasi efektif. Sebagai respons, pemerintahan Biden mengadopsi pendekatan seimbang antara *deterrence* dan diplomasi dengan mendukung penyusunan *Code of Conduct* (CoC) ASEAN–Tiongkok serta penerapan *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES). Strategi ini konsisten dengan dokumen *U.S. Indo-Pacific Strategy* (2022) yang menekankan komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan penyelesaian sengketa secara damai, sekaligus mencerminkan integrasi antara kekuatan militer dan diplomasi normatif dalam pengelolaan ketegangan maritim di kawasan (Shobirin R, 2023).

Pendekatan strategis Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden dalam mengelola isu Semenanjung Korea berfokus pada penguatan *extended deterrence*, namun secara tidak langsung turut memperkuat dinamika *security dilemma*. Intensifikasi kerja sama militer antara Washington dan Seoul—termasuk melalui latihan gabungan berskala besar, modernisasi sistem pertahanan rudal, dan pembentukan *Nuclear Consultative Group* (NCG)—dipersepsi oleh Pyongyang sebagai ancaman eksistensial. Hal ini memicu respons berupa percepatan program senjata nuklir dan uji coba rudal balistik, termasuk SLBM dan

ICBM. Eskalasi aksi–reaksi tersebut memperbesar risiko konflik tidak terduga dan mempersempit ruang diplomasi, sehingga menegaskan bahwa strategi deterrence, jika tidak diimbangi dengan pendekatan diplomatik, berpotensi menciptakan ketegangan berkelanjutan di kawasan (Salma N, 2022).

Kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Korea Utara berfokus pada pendekatan struktural melalui koordinasi dengan sekutu dan tekanan multilateral, menggantikan pendekatan personalistik era Trump. Meskipun saluran komunikasi terbatas tetap dipertahankan, strategi ini belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam denuklirisasi Semenanjung Korea. Di satu sisi, penguatan *deterrence* berhasil menciptakan stabilitas jangka pendek; namun di sisi lain, absennya kemajuan diplomatik menambah kompleksitas tantangan jangka panjang dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi AS perlu menyeimbangkan proyeksi kekuatan militer dengan diplomasi strategis guna mencegah spiral eskalasi yang kontraproduktif terhadap stabilitas kawasan.

KESIMPULAN

Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat menerapkan strategi Indo-Pasifik yang bersifat multidimensional dengan mengintegrasikan instrumen keamanan, diplomasi, dan ekonomi guna menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Inti dari strategi ini terletak pada penguatan *rules-based order*, revitalisasi aliansi tradisional seperti dengan Jepang dan Korea Selatan, serta penjagaan kebebasan navigasi di kawasan maritim strategis, khususnya Laut Cina Selatan. Dalam merespons dinamika geopolitik, khususnya meningkatnya pengaruh Tiongkok, Washington memperluas kerja sama trilateral dengan Tokyo dan Seoul melalui pelaksanaan latihan militer gabungan dan pembentukan *Nuclear Consultative Group* (NCG) yang bertujuan memperkuat mekanisme penangkalan terhadap ancaman dari Korea Utara. Strategi ini juga mendorong negara-negara mitra untuk memperkuat kapabilitas pertahanan mereka secara mandiri; Jepang melalui adopsi kebijakan *counterstrike capabilities*, dan Korea Selatan melalui akselerasi pengembangan sistem rudal canggih serta modernisasi industri pertahanannya. Namun demikian, strategi ini tidak lepas dari risiko. Intensifikasi pendekatan militer berpotensi memperkuat dinamika *security dilemma*, meningkatkan kemungkinan perlombaan senjata, dan menyulitkan upaya diplomasi dengan aktor-aktor seperti Korea Utara dan Tiongkok. Dalam isu Laut Cina Selatan, Amerika Serikat mengambil peran aktif melalui pelaksanaan operasi *Freedom of Navigation* (FONOPs), sekaligus mendorong penyusunan *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok sebagai bagian dari diplomasi maritim yang bertujuan mengurangi ketegangan dan mendorong pengelolaan sengketa secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

William D. Coplin, “Introduction to International Politics: A Theoretical Overview”. (Chaniago: Markham Publishing Company).

Internet:

Aldrin, M. Sengketa Laut China Selatan: Mampukah Indonesia Jadi Penjaga Perdamaian Kawasan? 2025. <https://kumparan.com/fachri-allegra/sengketa-laut-china-selatan-mampukah-indonesia->

- jadi-penjaga-perdamaian-kawasan-25CdIb2LJcs
- Amstutz, R. Mark. 1995. *International Conflict and Cooperation: An Introduction World Politics*. (Dubuque: Brown & Brenchmark,).
- Bahri, M. *Kebijakan Freedom Of Navigation Amerika Di Laut China Selatan*. 2016. file:///C:/Users/kimha/Downloads/atikamarzaman,+03+MUH+BAHRIX
- CNN Indonesia. *Alasan AS Mau Tarik 4.500 Tentara dari Korsel*. 2025. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250524083716-134-1232673/alasan-as-mau-tarik-4500-tentara-dari-korsel>.
- Dao, Y. *Ancaman Nuklir Korea: Dampak bagi Stabilitas Asia Timur dan Perdamaian Global*. 2024. <https://kumparan.com/opini-nusa/ancaman-nuklir-korea-dampak-bagi-stabilitas-asia-timur-dan-perdamaian-global-23ihrkMvU0e>
- Defense Priorities. 2020. *A plan for U.S. withdrawal from the Middle East*. <https://www.defensepriorities.org/reports/a-plan-for-us-withdrawal-from-the-middle-east/>
- Donald E. Nuechterlein, 'National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making', *British Journal of International Studies*, 2.3 (1976), 246–66 <<https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>>.
- Eka. Dkk. 2007. *Tantangan China Sebagai Superpower di Asia Timur*. Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Gatra, S. *Geopolitik Indonesia: ASEAN-Jepang Menjaga Stabilitas Kawasan*. 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/14352121/geopolitik-indonesia-asean-jepang-menjaga-stabilitas-kawasan?page=all>.
- History. 2024. *Korean War and Japan's Recovery*. <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/korean-war>
- Ipdefenseforum. *Kabar Terbaru Strategi Indo-Pasifik*. 2024. <https://ipdefenseforum.com/id/2024/05/kabar-terbaru-strategi-indo-pasifik/>
- Jack C. Plano, *The International Dictionary*, Third Edit (England: Clio Press Ltd, 1982). Page 7
- Lestanti, N. *AS Tarik 4.500 Tentara dari Korea Selatan, Stabilitas Asia Timur Terancam*. 2025. <https://www.tribunnews.com/internasional/2025/05/23/as-tarik-4500-tentara-dari-korea-selatan-stabilitas-asia-timur-terancam>.
- Mearsheimer, John. 2013. "Structural Realism", dalam Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, First Edit (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2016).
- Meganingratna,A. *Pengembangan Teknologi Dan Kekuatan Militer Sebagai Strategi Pertahanan Di Negara-Negara Kawasan Asia Timur*. <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/1105/1/jurnal%20kosmopolitan.pdf>
- Pongtiku, J. *Antara Kedaulatan dan Perdamaian: Simfoni Geopolitik di Panggung Asia Timur*. 2024. <https://kumparan.com/jodypratamajpp/antara-kedaulatan-dan-perdamaian-simfoni-geopolitik-di-panggung-asia-timur-23WcOyT1QOe>
- Poltak Partogi Nainggolan. *KEPENTINGAN STRATEGIS AMERIKA SERIKAT DI ASIA-PASIFIK*. 2013. file:///C:/Users/kimha/Downloads/329-638-1-SM.
- Pongtiku, J. *Antara Kedaulatan dan Perdamaian: Simfoni Geopolitik di Panggung Asia Timur*. 2024. <https://kumparan.com/jodypratamajpp/antara-kedaulatan-dan-perdamaian-simfoni-geopolitik-di-panggung-asia-timur-23WcOyT1QOe>
- Poltak Partogi Nainggolan. *KEPENTINGAN STRATEGIS AMERIKA SERIKAT DI ASIA-PASIFIK*. 2013. file:///C:/Users/kimha/Downloads/329-638-1-SM.
- Wijayanti, dan Ningsih. *Perang Korea: Penyebab, Jalannya Pertempuran, Penyelesaian, dan Dampak*. 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/28/160000879/perang-korea-penyebab-jalannya-pertempuran-penyelesaian-dan-dampak>.